

Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan *Whole of Government*

Yan Megawandi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang 33149
ymegawandi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: April 30, 2020

Revised: June 25, 2020

Accepted: July 5, 2020

Kata Kunci:

Implementasi WOG,
industry pariwisata, studi
kasus WOG

Keywords:

WOG implementation,
tourism industry, WOG
case study

ABSTRAK / ABSTRACT

Penelitian ini melihat bagaimana kinerja pembangunan pariwisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang *Whole of Government (WOG)*. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarannya secara deskriptif – analitik. Untuk mengetahui kinerja pembangunan pariwisata peneliti menggunakan beberapa aspek yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, manfaat pariwisata, serta peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk melihat faktor yang berpengaruh dari sudut pandang ini, dilihat dari aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik namun masih belum optimal terutama bila dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG, yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala. Kata kunci: Pembangunan pariwisata, percepatan, dan *Whole of Government*.

This study to observe the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung and the factors influencing the performance using the perspective of Whole of Government (WoG). The method used is a qualitative approach and descriptive-analytic. To understand the performance of tourism development, research used several aspects: tourism contribution to regional economy, tourism benefits, and the role of tourism in the protection and development of natural resources and the environment. Meanwhile, to see the influential factors from the perspective of WoG, the aspects viewed are: coordination among organizations, information sharing, organization capacity, flexibility and budget. The finding of this research shows that the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung is adequately good, however it is still not optimum, especially when it is compared to the great tourism potential of Kepulauan Bangka Belitung. Furthermore, the factors influencing the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung were observed from the perspective of WoG, which are coordination among institutions and information sharing, are still problematic.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terdiri dari enam kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.

Sektor pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dapat dilihat dari masukannya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Ketergantungan ekonomi makro daerah cukup besar kepada sektor pertambangan terutama pertambangan timah. Pemerintah daerah merencanakan untuk dapat segera menggantikan peran pertambangan tersebut oleh sektor lain yang lebih berkelanjutan. Peran sektor pertambangan terhadap PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 adalah 10,59 %. Angka tersebut sekilas terkesan tidak terlalu besar, namun kenyataannya sektor lain yaitu sektor industri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang kontribusinya terhadap PDRB sebesar 20,63 %, sebenarnya sebagian besar merupakan industri hilir dari pertambangan. Sehingga jika ingin melihat secara riil kontribusi sektor pertambangan (timah) merupakan penjumlahan dari sektor pertambangan dan sektor industri yaitu sekitar 31,23% %.

Di sisi yang lain dari data dalam Neraca Pariwisata Daerah (NesparDA) 2017 terlihat bahwa pertumbuhan sektor pariwisata adalah sebesar 4,06 %. Hal itu berarti kontribusi sektor pariwisata mengalami perlambatan dibandingkan dengan data kontribusi pariwisata pada NesparDA tahun 2011 yang sebesar 4,84 %. Artinya terdapat pengurangan sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 08 % dalam kurun waktu sekitar enam tahun terakhir. Perlambatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB tersebut dapat diasumsikan sebagai adanya hal-hal yang memerlukan pencermatan kembali terhadap upaya pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung agar dapat diperbaiki kinerjanya sesuai dengan rencana.

Pada tanggal 15 Maret 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Dengan luas kawasan 324,4 hektar, yang diharapkan mampu menarik investasi Rp. 20 triliun, mendatangkan

59.000 wisatawan dengan nilai ekonomi mencapai RP 751,4 milyar per tahun. PP ini menandai era baru dalam pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung sekaligus memperlihatkan kesungguhan pemerintah dalam menjadikan Belitung sebagai destinasi kelas dunia (Indonesia.go.id diakses tanggal 3 November 2019).

Kebijakan pariwisata yang menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2025 ialah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2025. Perda yang disahkan 31 Mei 2016 ini terdiri dari 39 pasal dan 14 bab yang mengatur secara rinci mengenai daya tarik wisata, destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata. Di dalamnya terdapat kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Indikasi berbagai program telah disiapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perda ini.

Pada bagian lain pengelolaan sektor yang memiliki banyak keterlibatan pihak-pihak seperti pariwisata dimaksudkan sangat sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh pemerintah bagi terwujudnya kepemimpinan yang bersifat kolaboratif yaitu pendekatan *Whole of Government (WOG)*. Salah satu karakter dari sektor pariwisata adalah banyaknya keterlibatan pihak-pihak yang secara bersama-sama mendorong pengembangan kepariwisataan. Karenanya kerjasama berbagai pihak terkait pengembangan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung merupakan prasyarat dari keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah leading sector di provinsi yang mengkoordinasikan kegiatan pembangunan pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung Perangkat Daerah lainnya. Pihak swasta melaksanakan ketersediaan layanan mulai dari transportasi, akomodasi dan konsumsi, bahkan juga atraksi. Masyarakat diharapkan memberikan sumbangan dengan partisipasi dan keterlibatan seperti ketertiban, ketentraman dan kedamaian di destinasi wisata yang ada. Termasuk peran sebagai penyedia layanan lain yang diperlukan oleh wisatawan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dilakukan penelitian yang ditujukan untuk melihat masalah:

1. Bagaimana kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG ?

Dalam pembangunan pariwisata Mill & Morrison (1985) mengusulkan mengenai adanya empat tujuan dari pembangunan pariwisata yaitu:

“ (1) Secara ekonomi, mengoptimalkan sumbangan sektor pariwisata dalam kegiatan perekonomian kesempatan kerja, peningkatan ekonomi daerah dan memperkuat neraca pembayaran internasional. (2) Bagi konsumen, adalah agar manfaat pariwisata dapat diterima oleh semua pihak, termasuk wisatawan dan masyarakat setempat. (3) Dari sisi sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata hendaklah dapat melindungi dan melestarikan seni dan budaya, kebiasaan hidup, sejarah dan situs serta adanya keserasian dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan secara umum. (4) Kegiatan-kegiatan pemerintah, berhubungan dengan bagaimana menyerasikan peran pemerintah dalam pariwisata terutama dalam kebutuhan masyarakat, dan mengambil kepeloporan dalam hal perlindungan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana”.

Selanjutnya Gunn dan Turgut (2002:14) menyatakan bahwa selain melihat dampaknya di bidang ekonomi perlu pula dilihat bidang-bidang lainnya yang terkena pengaruh dari pembangunan pariwisata. Menurutnya, keseluruhan aspek pembangunan pariwisata diarahkan untuk pencapaian visi dalam pengembangan pariwisata yang lebih baik dengan tujuan yang terdiri dari empat hal yaitu: (1) meningkatkan kepuasan wisatawan; (2) mengembangkan ekonomi dan keberhasilan usaha; (3) penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; dan (4) integrasi masyarakat dan kawasan.

Kebijakan pariwisata yang menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2025 ialah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016-2025. Perda yang disahkan 31 Mei 2016 ini terdiri dari 39 pasal dan 14 bab yang mengatur secara rinci mengenai daya tarik wisata, destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata. Di dalamnya terdapat kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Indikasi berbagai program telah disiapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perda ini.

Selanjutnya Gunn & Turgut (2002) menyatakan bahwa selain melihat dampaknya di bidang ekonomi perlu pula dilihat bidang-bidang lainnya yang terkena pengaruh dari pembangunan pariwisata. Menurutnya, keseluruhan aspek pembangunan pariwisata diarahkan untuk pencapaian visi dalam pengembangan pariwisata yang lebih baik dengan tujuan yang terdiri dari empat hal yaitu: (1) meningkatkan kepuasan wisatawan; (2) mengembangkan ekonomi dan keberhasilan usaha; (3) penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; dan (4) integrasi masyarakat dan kawasan.

Mengacu pada hal-hal terkait dengan kinerja kepariwisataan tadi maka dapat disimpulkan bahwa perspektif kinerja kepariwisataan dapat dilakukan antara lain dengan melihat: bagaimana sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah; bagaimana pariwisata memberikan manfaat; serta bagaimana pariwisata berperan dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Joint-Up Government (JUG) yang digunakan pertama kali oleh pemerintahan Blair di tahun 1997 guna menyelesaikan persoalan yang kompleks melewati batas-batas organisasi publik, tingkat administrasi, dan bidang kebijakan merupakan salah satu konsep yang kemudian dikembangkan sebagai WOG (Putri, 2017). Konsep JUG seperti yang disampaikan Ling (2002) yang kemudian juga disempurnakan menjadi best practice WOG oleh Management Advisory Committee (2004) yang menjelaskan bahwa dimensi yang pertama yaitu culture and philosophy dalam pendekatan WOG maksudnya ialah mendorong pentingnya upaya sharing informasi dan keselarasan antara kebijakan yang bersifat top down dengan arus dan isu yang bersifat *bottom up*. Kemudian pada dimensi yang kedua, berupa *new accountabilities and incentives* yang berarti bahwa pendekatan WOG memandang penting adanya *sharing outcome* dan *reward*. Pengakuan tentang management horizontal yang lebih melihat bahwa masing-masing pihak berada dalam posisi yang seimbang sangat diharapkan. Dimensi ketiga yaitu *new ways of developing policies, designing program and delivering services* yang menganggap bahwa pendekatan WOG mementingkan kebersamaan dalam bentuk *collegiate approach* dengan konsultasi dan keterlibatan klien serta pengguna. Sementara pada dimensi keempat yaitu *new ways of working* atau pendekatan WOG mengutamakan pentingnya peran *shared leadership*, fleksibilitas tim dan proses, fokus pada keahlian dan kooperatif dalam alokasi sumberdaya.

Metodologi

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2006). Penelitian yang dilakukan serta secara deskriptif – analitik untuk menggambarkan dan mengklarifikasi suatu peristiwa atau kenyataan sosial dan menemukan fenomena kunci (Yin, 1996). Karenanya

penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna menurut informan terhadap suatu peristiwa dalam suatu situasi tertentu melalui cara indepth interview dan melalui hasil observasi.

Lokasi penelitian di Kepulauan Bangka Belitung dengan narasumber pemangku kepentingan pariwisata mulai dari Perangkat Daerah ditingkat provinsi dan kabupaten, serta sektor swasta dan masyarakat. Adapun sumber data yang dibutuhkan berupa sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang diharapkan mampu menggali motif, suasana, kondisi, serta latar belakang untuk menggali pemahaman yang diperlukan baik dari unsur pemerintahan, swasta dan masyarakat.

Penelitian menggunakan teknik sampling (teknik pengambilan sampel) nonprobability sampling yaitu purposive sampling dimana dilakukan dengan menentukan nara sumber, memperhatikan berbagai pertimbangan. Juga dengan menggunakan *snowball sampling* guna membantu peneliti mendapatkan narasumber yang diperlukan untuk memperoleh data penelitian.

Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk sektor pemerintahan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, serta Perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung, seperti Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Lingkungan Hidup, serta BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk nara sumber dari swasta berasal dari GIPI, PHRI, dan ASITA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Untuk masyarakat narasumber berasal dari Lembaga Adat Melayu, Lembaga Kesenian dan pengusaha UMKM. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka termasuk dari penelitian-penelitian terdahulu, dan menggali laporan-laporan tertulis yang ada.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil pemikiran awal dari Ling (2002) dan Management Advisory Committee (2004) dalam melihat pendekatan WOG yaitu: Koordinasi antar organisasi; sharing informasi; kapasitas dan sarana prasarana organisasi; fleksibilitas; dan budget. Sedangkan untuk melihat kinerja kepariwisataan menggunakan pendapat Mill & Morrison (1985) yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah; manfaat pariwisata; dan peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari responden dan informan. Responden yang terlibat dalam penelitian ini yaitu alumni Pelatihan Teknis Jarak Jauh PSHA Angkatan 1 Tahun 2018 dan rekan kerja alumni. Sedangkan informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah alumni Pelatihan Teknis Jarak Jauh PSHA Angkatan 1 Tahun 2018 dan atasan/pimpinan alumni. Pelatihan Teknis Jarak Jauh PSHA diselenggarakan pada 3 Mei sampai dengan 6 Juli 2018, sedangkan kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2019.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari sisi ekonomi yang antara lain dilakukan dengan mencermati bagaimana sumbangan sektor pariwisata dalam bentuk jumlah angka kunjungan, PDRB, tenaga kerja serta, investasi dan pendapatan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal lain yang juga dapat dipandang sebagai kinerja pariwisata tersebut adalah bagaimana manfaat adanya pariwisata, serta bagaimana peran pariwisata terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup (Mill & Morrison, 1985).

Untuk jumlah wisatawan yang dapat dilihat dari laporan BPS Kepulauan Bangka Belitung pada jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah kunjungan terlihat dari jumlah tamu di hotel berbintang yang dicatat oleh BPS adalah 83,38 % dalam waktu empat tahun terakhir, atau rata-rata terjadi kenaikan sebesar 20,84 % per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu 42,28 % yang bersamaan waktunya dengan tahun ditetapkannya destinasi wisata Tanjung Kelayang di Pulau Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata) di bulan April 2016. Sementara angka pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya meningkat sebesar 3,01 %. Kecilnya angka pertumbuhan ini sebagai dampak dari kenaikan harga tiket pesawat di tanah air pada bulan November 2018. Di tahun 2018 pengaruh dari hal itu sudah mulai terlihat dengan menurunnya angka pertumbuhan yang semula 22,06 % di 2017 menjadi hanya 16,03 % saja di 2018.

Tabel 1. Jumlah tamu hotel berbintang di Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun	Tamu Asing	Tamu Indonesia	Total Tamu
2016	5.037	295.688	300.725
2017	7.143	359.901	367.084
2018	8.124	417.818	425.942
2019	9.183	429.591	438.774

Sumber: BPS

PDRB sektor pariwisata merupakan salah satu cerminan kemajuan sektor pariwisata. Publikasi terakhir yang disampaikan oleh BPS Kepulauan Bangka Belitung tentang kepariwisataan adalah berdasarkan Nesparda di Kepulauan Bangka Belitung dibuat tahun 2011 dan tahun 2017. Tahun 2017 diterbitkan Desember 2018. Berdasarkan Nesparda ini maka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 4,06 % atau senilai Rp. 2.796 miliar di tahun 2017. Jika dilihat sekilas secara prosentase maka terdapat pengurangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di tahun 2017 sebesar 0,78 % jika dibandingkan dengan di tahun 2011 yang tercatat sebesar 4,84 % atau senilai Rp. 1.443,4 milyar.

Tabel 2. Sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun	Rupiah (miliar)	Persen
2011	1.443,4	4,84
2017	2.796	4,06

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata daerah 2011 dan 2017

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Neraca Wilayah Statistik (Nerwilis) BPS Kepulauan Bangka Belitung, pengurangan kontribusi yang lebih kecil di Nesparda 2017 tersebut kemungkinan terjadi karena perubahan dalam cara penghitungan Nesparda. Di tahun 2017 BPS mengubah tahun dasar dan cakupan PDRB. Jika di dalam Nesparda 2011 tahun dasar yang dipergunakan adalah tahun 2000, maka di Nesparda 2017 tahun dasarnya adalah tahun 2010. Karena itu memang terkesan angka kontribusi sektor pariwisata seolah-olah terdapat perlambatan. Padahal menurutnya, terdapat peningkatan dalam ekonomi pariwisata Bangka Belitung di 2017. Hal itu tergambar dari peningkatan beberapa indikator seperti meningkatnya jumlah wisatawan, meningkatnya pengeluaran wisatawan, dan adanya peningkatan investasi.

Sebagai perbandingan dapat pula dilihat hasil penelitian Valeriani (2017) yang melakukan penghitungan PDRB pariwisata Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan harga konstan dengan menggunakan tahun dasar tahun 2000 di 7 kabupaten/kota. Berdasarkan penelitiannya terdapat fluktuasi peningkatan PDRB sektor pariwisata terhadap PDRB kabupaten/kota dalam kurun waktu 2005-2015.

Menurut Valeriani (2017) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih belum dominan yang dapat ditafsirkan bahwa ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bergantung kepada sektor-sektor lain seperti pertambangan, perkebunan dan industri pengolahan. Secara rata-rata di kabupaten/kota pertumbuhan PDRB pariwisata yaitu pada periode 2005-2009 sebesar 0,05 %. Periode 2010-2015 meningkat menjadi 0,07 %. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata secara rata-rata terhadap PDRB sebesar 1,28 % pada periode 2005-2009, dan 3,28 % pada periode 2010-2015. Atau terjadi kenaikan 2 % yang dapat ditafsirkan bahwa sektor pariwisata semakin menguat perannya, walaupun belum menjadi sektor unggulan secara (sumbangan) ekonomi daerah (Valeriani, 2017).

Perkembangan pariwisata juga membawa pengaruh pada kondisi tenaga kerja di Kepulauan Bangka Belitung karena adanya permintaan terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata. Besarnya kompensasi/upah dan gaji tenaga kerja dari kegiatan pariwisata di 2017 mencapai Rp. 1,97 triliun atau 7,59 % terhadap total kompensasi tenaga kerja Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut meningkat jika dibandingkan 2011 yang hanya mencapai Rp 401,8 miliar atau 6,86 % terhadap total Kepulauan Bangka Belitung. Artinya terdapat peningkatan kompensasi tenaga kerja sebesar 48,9% namun terjadi penurunan sebesar 0,73% terhadap total kompensasi tenaga kerja. Dengan demikian kemungkinan terdapat sector lain yang pertumbuhan kompensasi ke tenaga kerjanya lebih besar dari pada pariwisata. Untuk jumlah tenaga kerja terkait sektor pariwisata di 2011 mencapai 18.000 orang atau 3,06 % dari tenaga kerja di Kepulauan Bangka Belitung. Pada 2017 terdapat 27.000 orang atau 3,85 % dari total tenaga kerja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian terdapat penambahan serapan tenaga kerja di sektor pariwisata sebesar 9.000 orang atau 0,79 %.

Investasi pariwisata merupakan pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelaku investasi tersebut merupakan produsen barang dan jasa yang tersebar mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta termasuk juga di dalamnya rumah tangga. Investasi di bidang pariwisata bisa bersifat langsung manakala produk yang dihasilkan bisa langsung dimanfaatkan oleh wisatawan dalam berwisata seperti hotel, restoran dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak langsung berupa infrastruktur yang berhubungan dengan pariwisata seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya. Investasi sektor pariwisata merupakan bagian dari Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB).

Pada tahun 2011 total investasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp. 788,92 miliar yang terbesar dialokasikan untuk investasi di bangunan hotel dan akomodasi lainnya dengan nilai Rp.468.878,40 atau 59,43 % dari total investasi di bidang pariwisata. Sedangkan di 2017 jumlah investasi pariwisata meningkat menjadi Rp. 1,29 triliun. Dengan alokasi investasi tertinggi masih pada bangunan hotel dan akomodasi lainnya dengan angka Rp. 685,59 miliar atau 53,02 % dari total investasi pariwisata. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata di kepulauan Bangka Belitung masih dalam masa bertumbuh yang dibuktikan dengan masih tingginya investasi di bidang akomodasi.

Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan berdasarkan data dari kabupaten/ kota menggambarkan tetap ada peningkatan namun mengalami perlambatan. Pengumpulan PAD dari ketujuh kabupaten/kota se Babel dilakukan dengan melihat semua pendapatan yang terkait pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Beberapa pendapatan dari retribusi juga dimasukan seperti retribusi masuk ke tempat wisata, serta hasil dari pengelolaan lainnya Kawasan wisata yang dimiliki daerah. PAD sektor pariwisata ini semuanya berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Kota.

Apabila di tahun 2018 PAD dari pariwisata di Bangka Belitung berhasil melaju dengan angka 22,37 % dibandingkan dengan pendapatan 2017 dengan total pendapatan sebesar RP. 58,242 juta. Di tahun 2019 angka pertumbuhan PAD pariwisata hanyalah naik sebesar 9,18% saja dibanding 2018, atau menjadi sebesar RP. 63,589 juta.

Salah satu tujuan dikembangkannya pariwisata di suatu daerah adalah karena adanya harapan akan memberikan manfaat kepada masyarakat, baik yang ada di daerah destinasi maupun masyarakat lainnya, bahkan juga kepada masyarakat pendatang atau pengunjung yang hadir. Terdapat banyak pertimbangan orang untuk mengunjungi suatu daerah dalam rangka melakukan perjalanan wisata, termasuk ke Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Dinas pariwisata yang terdapat dalam RIPPAPROV maka dapat digambarkan daya Tarik wisata yang sering dikunjungi para wisatawan dan mengundang kepuasan wisatawan. Di antaranya adalah pantai dan pulau-pulau kecil serta suasana alamnya. Sedang kegiatan yang paling disukai wisatawan adalah kegiatan di pantai, kuliner serta masyarakatnya. Di samping terdapat hal-hal yang sangat diminati oleh pengunjung namun ternyata masih ada pula hal yang tidak disukai oleh pengunjung. Kondisi dimaksud misalnya adalah karena pantai dan daya tariknya cukup kotor dan banyak sampah yang berserakan. Hal lain yang menjadi keluhan adalah persediaan air yang buruk, selanjutnya menu restoran yang kurang, serta masih terganggunya wisatawan dengan suara musik luar yang mengganggu.

Sedangkan atraksi wisata yang ada serta diharapkan oleh wisatawan mampu menarik pengunjung adalah: fasilitas diving dan snorkeling yang lebih bagus. Kemudian wisatawan menginginkan adanya geotrail. Yang lainnya ialah diharapkan adanya kehadiran galeri budaya, fasilitas kursi di pantai dan informasi berbahasa Inggris yang lebih memadai. Wisatawan yang kembali berkunjung ke Bangka dan Belitung adalah karena keberadaan pantai dan pulau-pulaunya yang dipandang indah.

Kehadiran pariwisata dalam kehidupan masyarakat selama dua dekade di Kepulauan Bangka Belitung membawa nuansa baru. Hal tersebut sangat dirasakan utamanya di Pulau Belitung yang perkembangannya lebih pesat jika dibandingkan dengan di Pulau Bangka.

Kabupaten Belitung berhasil memanfaatkan momentum "Laskar Pelangi". Kemajuan pariwisata Belitung dapat dilihat dari mulai meningkatnya infrastruktur kepariwisataan seperti hotel restoran dan rumah makan, serta menjamurnya travel agen serta persewaan mobil wisata. Termasuk pula tumbuhnya UMKM yang menghasilkan dan menjual barang-barang cenderamata bagi wisatawan. Seperti yang dijelaskan narasumber di Belitung (wawancara narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Desember 2019):

"Pariwisata ini bersifat multi sector. Baik yang bergerak di sektor inti maupun pendukung sesuai dengan tiga hal yaitu aksesibilitas, amenities dan atraksi. Itu semua berkembang pesat di Belitung dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sektor intinya sekarang masyarakat sudah berdampak luar biasa. Sudah banyak desa wisata, homestay, kerajinan, souvenir, kuliner, angkutan, rental kendaraan dan lain-lain. Kemudian di sektor

ekonomi pendukungnya juga berkembang seperti penyediaan kebutuhan wisatawan yang dipenuhi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri. Saya pikir ini luar biasa”.

Menurut penjelasan nara sumber Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (wawancara tanggal 13 Desember 2019), perkembangan usaha binaannya semakin membaik dengan makin banyaknya acara dan kunjungan wisatawan ke Babel. Menurutnya uang yang mengalir ke UMKM pada satu event yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia bisa mencapai angka Rp. 1 milyar. Hal serupa juga diakui narasumber yang juga pengusaha UMKM.

Tabel 3. Jumlah UMKM Kepulauan Bangka Belitung 2017-2019.

No	Tahun	Usaha mikro	Usaha kecil	Usaha menengah	Total
1	2017	114.648	35.387	835	150.870
2	2018	114.573	35.514	861	150.948
3	2019	124.601	35.724	861	161.186

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kep Bangka Belitung

Perkembangan yang terjadi dalam kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung ternyata juga memberikan andil dalam pertumbuhan kehidupan Lembaga kesenian dan kebudayaan yang ada. Hadirnya wisatawan membuat budaya daerah perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari atraksi yang disajikan dan dinikmati oleh wisatawan. Pembentukan Lembaga adat seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) serta Dewan Kesenian dan tumbuhnya berbagai sanggar budaya yang ada, memperlihatkan bahwa pariwisata memiliki peran dalam ikut mengembangkan budaya dan kesenian. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dilakukan di desa-desa yang dipandang dapat dijadikan atraksi budaya ikut didukung oleh pemerintah provinsi.

Perkembangan wisatawan yang semakin dewasa (*mature*) seperti yang disitir oleh Pitana (2005) ternyata memberikan pengaruh positif terhadap upaya untuk semakin mencintai lingkungan melalui kegiatan berwisata.

Dalam RPJMD Perubahan 2017-2022 pariwisata menjadi prioritas dalam peningkatan perekonomian daerah, arah kebijakan yang dilaksanakan antara lain: peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata dan peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Dalam situasi seperti saat ini dimana kawasan penambangan timah sudah mulai merambah kawasan lindung, maka dokumen perencanaan pariwisata (Ripparprov) beserta seluruh lampirannya merupakan salah satu upaya mitigasi kawasan pariwisata yang semestinya diberdayakan menjadi laksana benteng yang ikut menjaga kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan daerah tersebut sebagai destinasi wisata. Sekaligus juga kepastian hukum dalam Perda dimaksud juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Karena merupakan daerah kepulauan maka sebagian besar kawasan wisata yang ada merupakan destinasi wisata bahari berupa pantai, laut dan pulau-pulau kecil. Secara yuridis sudah apa perda tentang kepariwisataan yang mengatur, tinggal pelaksanaan penegakan hukumnya yang kemudian harus pula diperhatikan.

Dari sisi pengelolaan hutan pengembangan pariwisata daerah kemudian berhasil memunculkan Kawasan hutan sebagai alternatif wisata baru di Kepulauan Bangka Belitung. Pengembangannya menjadi Kawasan pariwisata ada yang diinisiasi oleh masyarakat, ada pula yang dilakukan oleh perusahaan.

Hutan Rimba Mambang di Desa Dalil misalnya yang merupakan Hutan Adat seluas 55,7 hektar Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalil setelah dikeluarkannya Peraturan Desa Dalil Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Wisata Edukasi Rimbe Mambang. Perdes tersebut mengatur tentang tujuan, wilayah hutan, kepemilikan, sistem pengelolaan, peran masyarakat, dan sistem pendanaannya. Pemerintah Kabupaten Bangka menyambut inisiatif Desa Dalil tersebut dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membangun Kebun Raya. Salah satu alasannya adalah bahwa konsep kebun raya yang memiliki 5 fungsi (konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan) sangat relevan dengan tujuan Kawasan Wisata Edukasi Rimbe Mambang sebagaimana tertuang dalam Perdes, yaitu untuk konservasi, penelitian dan pendidikan, objek wisata, jasa lingkungan, dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (<http://kebunrayadaerah.krbogor.lipi.go.id/>).

Komunitas Hutan Seberang Bersatu di Desa juru Seberang Kabupaten Belitung mengembangkan kawasan mangrove bekerjasama dengan Yayasan Terangi dari Jawa Barat (Safran, *dkk* 2019). Kegiatan mereka berhasil meningkatkan jumlah kunjungan dari hanya 3000 menjadi 14000 kunjungan per bulan. Sementara di Pulau Bangka pengembangan wisata hutan mangrove juga dilakukan seperti di Munjang Kurau Barat Desa Kurau kabupaten Bangka Tengah, dan Kawasan wisata mangrove Desa tukak di Kabupaten Bangka Selatan, Hutan wisata mangrove Penagan di Desa Penagan Bangka Tengah, serta Kawasan wisata mangrove Lengkung Bulan di Kampung Tanjung Sawah, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Pengembangan pariwisata berbasis hutan mangrove ini disamping menambah pengetahuan masyarakat tentang betapa kayanya ekologi hutan mangrove ternyata juga dapat mencegah adanya kerusakan berupa pembukaan yang sporadis terhadap hutan mangrove. Ancaman kerusakan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung selama ini berasal dari penambangan timah tanpa izin, pengembangan kawasan tambak, serta penebangan kayu untuk bangunan dan pembuatan arang.

Upaya pelestarian satwa juga mulai berkembang di Bangka Belitung. Di pulau Bangka upaya pelestarian dan budidaya penyu telah mulai dikembangkan oleh seorang pengusaha yang mulai berkecimpung di dunia pariwisata, Sian Sugito. Penangkaran penyu ini baru memelihara penyu hijau dan penyu sisik. Lokasi budi daya penyu yang dinamakan Tukik Babel ini terletak di sebelah Pantai Batavia yang berada di Sungailiat. Sian Sugito bekerja sama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Menurut Sian, pelestarian penyu ini adalah sebagai upaya menjaga agar penyu tetap ada, karena penyu hampir punah dan jarang ditemukan di perairan Pulau Bangka, karena adanya kegiatan dan kapal isap yang merusak ekosistem laut di pulau.

Sementara di Pulau Belitung penangkaran penyu diawali kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) yang dipimpin oleh Budi Setiawan. Kelompok ini memulai usahanya dengan mengajak para nelayan melestarikan dan menjaga terumbu karang. Upaya diawali dengan membeli ikan-ikan hias yang sering berada di karang di dekat pantai. Dengan mengembangkan bisnis ikan hias ini diharapkan terumbu sebagai rumah bagi ikan hias akan ikut terjaga kelestariannya. Budi daya dan pelestarian penyu di Pulau Belitung sempat menjadi objek kunjungan wisatawan ketika dikembangkan di Pulau Kepayang. Misalnya ketika penutupan acara Sail Wakatobi Belitung di tahun 2011 dilakukan pelepasan tukik sebanyak 300 ekor ke laut lepas.

Pengembangan usaha ecotourism mulai dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya ialah upaya yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok pecinta lingkungan dalam menjaga kelestarian binatang Tarsius. Ada dua jenis tarsius di Babel yaitu yang terdapat di Pulau Bangka (Tarsius Bancanus Bancanus) dan yang di Pulau Belitung (Tarsius Bancanus Saltator). Penangkaran hewan nokturnal Tarsius di Belitung dimulai dari kegiatan oleh Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) di Taman Wisata Alam Kawasan Batu Mentas sekitar kaki Gunung Tajam Kecamatan Badau.

Peluncuran awal kawasan Suaka Tarsius dan Wisata Alam Batu Mentas dilakukan pada bulan Maret 2012 oleh Global Environment Program bersama Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB). Sebagai wild live sanctuary maka Batumentas tidak hanya taman suaka bagi tarsius semata- mata namun juga bagi flora dan fauna lainnya seperti pelanduk, burungsiau, tupaikeraras, serta tanaman hutan seperti buah rukam, pelawan dll. Salah satu keberhasilan kelompok ini adalah lahirnya seekor bayi tarsius di penangkarannya pada akhir Desember 2016 yang lalu. Hal ini merupakan sebuah prestasi mengesankan karena kelahiran tarsius di penangkaran masih sangat jarang terjadi.

Guna memahami bagaimana strategi koordinasi yang dilakukan ketika melaksanakan koordinasi antar organisasi maka dapat dilihat berdasarkan dimensi waktu. Alexander (1995) menyatakan bahwa strategi koordinasi dimensi waktu ini terdiri dari koordinasi antisipatif dan strategi adaptif. Secara antisipatif manakala melihat koordinasi pada saat perencanaan. Sedangkan strategi adaptif berupa koordinasi yang dilakukan mulai dari pelaksanaan, pemantauan, umpan balik dan pengendalian.

Jika dilihat dari koordinasi para saat perencanaan di dalam pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung maka sampai saat ini masih terdapat kegamangan. Hal itu berasal dari pembagian tugas dan kewenangan yang terdapat dalam pasal 32 (ayat 1) Perda Ripparprov yang menyatakan bahwa "Perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program kepariwisataan Daerah Provinsi". Hal tersebut dilanjutkan di pasal 33 (ayat 2) yang menyatakan bahwa "Pembinaan, pengawasan dan pengendalian...dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata". Ketentuan ini menjadi persoalan karena dua hal.

Pertama, Dinas Pariwisata Provinsi Kep. BABEL dalam hal perencanaan di daerah tidak masuk menjadi anggota dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memiliki kewenangan menentukan kegiatan dan besaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD. Sehingga Dinas Pariwisata tidak memiliki jangkauan yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang diamanatkan pasal 32 dan 33 Perda tentang Ripparprov. Kedua, ketika Perda tentang Ripparprov sedang dibahas di DPRD pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pariwisata masih memiliki struktur yang diperkirakan akan mampu mendukung kinerja perencanaan yaitu dengan adanya Kepala Bidang Perencanaan sebagai pejabat eselon 3 yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perencanaan Kepariwisata di level provinsi. Akan tetapi sejak berlakunya Perda nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan PP 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka struktur Dinas Pariwisata berubah dan tidak ada lagi Kabid Perencanaan tersebut. Saat ini tugas perencanaan hanya dilakukan oleh pejabat eselon 4 yang akan sangat sulit mengkoordinasikan perencanaan baik ke pusat, kabupaten/kota maupun kepada sesama Perangkat Daerah.

Perlunya penyempurnaan dalam koordinasi di antara sesama perangkat daerah tersebut misalnya terlihat dari bagaimana pembangunan destinasi wisata yang ada. Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata bahwa salah satu strategi dalam perencanaan pembangunan pariwisata adalah dengan menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail (RIRD) pembangunan pariwisata. Kepulauan Bangka Belitung mencakup empat Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Tanjung Kelayang dan sekitarnya. Keempat KPPN tersebut ialah: KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, KPPN Belinyu dan sekitarnya, KPPN Tanjung Kelayang- Belitung dan sekitarnya, serta KPPN Punai – Belitung dan sekitarnya.

Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di beberapa perangkat daerah provinsi jika dibandingkan dengan program dan kegiatan pada lampiran Perda Ripparprov yaitu di lampiran IV, ternyata masih ditemukan cukup banyak hal yang tidak sinkron jika mengacu kepada Perda Ripparprov yang ada.

Koordinasi juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi kepada pihak-pihak lain seperti kalangan masyarakat, atau dari individu dan komunitas dalam pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya telah ada selama ini. Hal tersebut dapat dilihat dari telah adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas yang ada di daerah ini. Seperti komunitas penggemar mobil, motor dan sepeda untuk kelompok yang gemar berkendara. Demikian pula dengan kelompok fotografi, serta olahraga dan bidang minat yang lain.

Adanya kelompok-kelompok yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembuatan berbagai kegiatan menjadikan semakin banyaknya pula pelaksanaan kegiatan komunitas dan masyarakat di Bangka Belitung, baik kegiatan skala daerah, nasional, maupun internasional. Misalnya penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, kuliner, dan berbagai kegiatan rapat kerja yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Misalnya penyelenggaraan kegiatan Kemah Saka Widya Budaya yang dilakukan oleh pramuka Kepulauan Bangka Belitung selama seminggu di November 2018. Diikuti oleh sekitar 1200 peserta dari seluruh Indonesia.

Koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap pihak swasta dalam perencanaan pengembangan DTW ternyata tidak sebaik koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dalam bentuk pelaksanaan kalender event seperti yang telah diuraikan terdahulu. Sebagai contoh narasumber yang merupakan pengelola DTW di Kabupaten Belitung menyatakan bahwa mereka belum dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Dinas Pariwisata provinsi terkait rencana pembangunan DTW.

Pelaku pariwisata yang sudah lama berkiprah di Pulau Bangka misalnya juga mengeluhkan koordinasi ini. Seperti yang disampaikan seorang nara sumber yang merupakan anggota Asita Kepulauan Bangka Belitung (wawancara tanggal 14 Desember 2019).

“Belakangan rasanya sudah kurang ya koordinasi dari provinsi. Pernah kapan itu kita diundang rapat. Acaranya jam 9 pagi. Undangannya baru nyampe jam 8.30. kayaknya ga niat ngundang kita-kita. Padahal sekarang kan sudah ada WA dan macam-macam yang bisa lebih baik kalau memang ingin mengundang kita hadir dalam rapat”.

Seorang pengusaha UMKM yang mengembangkan produk kain tenun cual yang merupakan kain khas Bangka Belitung juga mengakui bahwa koordinasi dengan para pengusaha khususnya UMKM masih perlu ditingkatkan (wawancara tanggal 2 Februari 2020).

Dalam pembahasan untuk melihat apakah pelaksanaan pembangunan pariwisata sudah melaksanakan prinsip-prinsip WOG dibahas juga mengenai bagaimana berbagi informasi dilakukan. Salah satunya adalah dalam model koordinasi penggunaan Teknologi Informasi antara Dinas Pariwisata dengan dinas terkait lainnya. Kemudian berbagi informasi yang terjadi pada waktu perencanaan. Pada beberapa konfirmasi yang dilakukan dengan dinas lainnya ternyata ditemukan bahwa dinas terkait dimaksud masih ada yang tidak memahami dukungan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam pengembangan pariwisata. Misalnya saja koordinasi yang dilakukan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfo belum optimal yang terbukti dari masih belum berjalannya Sistem Informasi Daerah Tujuan Wisata (DTW) berbasis teknologi informasi. Belum optimalnya koordinasi ini terjadi karena pejabat Diskominfo selama ini belum mengetahui peranannya dalam Ripparprov. Sebenarnya sudah ada produk sistem informasi pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi yang telah disiapkan oleh Diskominfo yang dinamakan “B A N T U K U”.

BANTUKU merupakan sebuah aplikasi induk di android yang dapat diunduh di playstore. Aplikasi ini merupakan semacam aplikasi induk dari 6 aplikasi lainnya. Akan tetapi layanan ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena masih dalam tahap pengembangan walaupun pengadaannya telah dilakukan dengan anggaran di tahun 2017. Sampai akhir tahun 2019 aplikasi ini juga masih belum melunasi pembayaran di Google untuk layanan OTP (on time password). Dinas Pariwisata misalnya telah berusaha menyediakan informasi seputar layanan untuk Lamuter dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara informal. Namun karena

belum bisa dioperasionalkan maka penggunaan teknologi informasi untuk promosi kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung juga belum dapat digunakan.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa masih ada Perangkat Daerah yang belum paham dan belum mengetahui peranannya di dalam Ripparprov sehingga tidak berperan sebagaimana mestinya. Hal yang hampir sama juga terjadi dalam sharing informasi dengan Bappeda. Akibatnya pengawalan yang seharusnya dilakukan oleh Bappeda selaku perangkat daerah yang mengawal dan melakukan sinkronisasi semua perencanaan di daerah kurang optimal manakala harus mengawal kegiatan-kegiatan yang seharusnya merupakan pelaksanaan dari Ripparprov.

Salah satu bagian penting yang juga perlu dilihat dalam penerapan WOG pada pembangunan pariwisata ini adalah bagaimana kondisi atau kapasitas dan sarana prasarana organisasi dalam hal ini Dinas Pariwisata. Mengacu pada Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi.

Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Pariwisata adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Termasuk juga kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah. Struktur Organisasi dinas terdiri dari 1 Kepala Dinas 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 15 Kepala seksi. Di dalam struktur yang ada untuk perwakilan Dinas Pariwisata di Pulau Belitung saat ini juga telah ditempatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan penanggung jawab pejabat eselon 3 dengan 3 pejabat eselon 4.

Saat ini terdapat kesulitan yang cukup mengganggu di Dinas Pariwisata yang tidak lagi memiliki pejabat setingkat eselon 3 yang dapat mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan kepariwisataan. Memang ketika Perda tentang Ripparprov sedang dibahas di DPRD pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pariwisata masih memiliki struktur ini. Namun sejak berlakunya Perda nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan PP 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, struktur Dinas Pariwisata berubah. Saat ini tidak ada lagi Kepala Bidang Perencanaan tersebut. Tugas perencanaan sekarang dilakukan oleh pejabat eselon 4. Hal inilah antara lain yang menimbulkan kesulitan mengkoordinasikan perencanaan. Baik ke pusat, kabupaten/kota maupun kepada sesama Perangkat Daerah.

Sedangkan gambaran sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata jika dilihat dari latar belakang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa kapasitas SDM dengan status PNS yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi sudah cukup memadai. Dari 65 pegawai yang dimiliki terdapat 40 orang atau 61,5 % sarjana S1 dan 12 orang sarjana S2 atau 18,46 %. Hal tersebut berarti bahwa sekitar 80 % karyawan di Dinas Pariwisata merupakan sarjana dengan berbagai latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja.

Hanya saja ke depan kemungkinan perlu pula disempurnakan dengan pendekatan penempatan yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan agar mampu mendukung kinerja dinas. Serta rotasi yang akan mampu menyegarkan kondisi di dinas pariwisata. Misalnya saja perlu ditempatkan sarjana dengan latar belakang komunikasi serta desain untuk mengawal kegiatan-kegiatan pemasaran. Atau juga penempatan sarjana planologi dan perencanaan di bidang destinasi. Seorang sarjana dengan latar belakang humaniora juga diperlukan untuk memperkuat kinerja di bidang kebudayaan supaya lebih mampu memahami persoalan-persoalan menyangkut tradisi serta kebudayaan di daerah. Sebagai contoh kepala bidang kebudayaan adalah seorang sarjana teknik kimia yang telah bekerja sebagai kabid selama delapan tahun kemudian menjadi sekretaris dinas selama sekitar dua tahun. Sekarang ditempatkan kembali sebagai kepala bidang kebudayaan.

Dari segi kesungguhan bekerja para pegawai nampaknya sudah terbiasa bekerja secara bersama, bahkan di luar jam kantor sekalipun. Mereka menyadari bahwa banyak sekali kegiatan yang menyangkut bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang justru berlangsung di luar jam kerja normal kantor, seperti hari Sabtu dan Minggu, serta di hari libur lainnya.

Untuk keberadaan sarana pendukung lainnya seperti kendaraan serta peralatan yang ada berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas (wawancara 30 November 2019) pada saat ini sudah cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di dinas-dinas lainnya. Hanya saja menurutnya optimalisasi penggunaan aset tersebut yang masih perlu dilakukan. Misalnya keberadaan mobil pemutar film yang masih sangat jarang dipergunakan. Sedangkan untuk mobil toilet dipandang sangat perlu diadakan guna dapat memberikan fasilitas kepada kegiatan-kegiatan yang seringkali mengambil tempat di ruang terbuka yang terkadang jauh dari fasilitas MCK.

Permasalahan terkait fleksibilitas antara lain dapat dilihat dalam dokumen perencanaan pariwisata (RIPPARPROV) yang dijadikan dasar dalam pembangunan pariwisata daerah. Di satu sisi hal ini adalah dalam upaya menjamin kepastian kawasan-kawasan mana saja yang misalnya harus diberikan prioritas intervensi. Baik melalui kegiatan-kegiatan di Dinas Pariwisata atau di Perangkat Daerah lainnya yang telah ditentukan dalam Ripparprov yang termuat dalam Lampiran IV.

Di sisi yang lain ternyata dalam perkembangannya cukup banyak terdapat tempat-tempat yang dijadikan Destinasi wisata baru yang berada di luar rencana pada Ripparprov. Untuk kasus-kasus seperti ini maka kucuran

dana dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk kegiatan tidak bisa dilakukan untuk membantu. Seperti Eco park dan pantai Batavia/Tongaci di kota Sungailiat, serta Pulau Kepayang di Kabupaten Belitung.

Selain dalam perencanaan, terdapat persoalan lain yang juga dihadapi pada pelaksanaan kegiatan yang terdapat di Dinas pariwisata. Dalam beberapa kondisi ternyata juga terdapat arahan dari atasan untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya tidak tercantum atau tidak berkaitan dengan tindak lanjut dari Ripparprov beserta turunannya. Pada kondisi dimana sumber pendanaan tidak menjadi kendala berarti maka hal seperti ini masih lebih mudah dilaksanakan. Akan tetapi apabila dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang dialokasikan maka timbulah masalah pada pendanaannya yang bukan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi.

Hal lain yang juga terungkap ialah munculnya atau adanya usulan kegiatan yang menyangkut kepariwisataan yang justru tidak berasal dari dinas pariwisata sendiri, namun dimintakan dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Seorang narasumber misalnya menyampaikan bahwa pernah ada kegiatan yang ternyata muncul bukan dari pihak mereka namun sudah mendapat persetujuan. Untuk hal yang seperti ini agar tidak terjadi persoalan yang muncul di belakang hari biasanya terpaksa dengan berbagai cara diatur sedemikian rupa untuk tidak dilaksanakan pekerjaannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan beberapa kali terjadi kesulitan karena kekurangan dana. Hal ini terjadi disebabkan pada waktu penyusunan anggaran tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan tahun yang lalu. Waktu membuat usulan anggaran ke depan hanya dibuat secara copy paste saja tanpa diikuti dengan upaya untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan tahun yang lalu. Solusinya adalah dengan mengajukan perubahan di saat adanya perubahan anggaran.

Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata maka pemerintah juga harus melakukan dorongan mulai dari penciptaan destinasi yang berkualitas maupun berupa fasilitasi SDM, serta melakukan promosi dan pembinaan kepada stakeholder terkait. Khusus dalam hal untuk lebih memperkenalkan dan mengangkat citra pariwisata Kepulauan Bangka Belitung juga dibutuhkan penganggaran untuk promosi.

Pengeluaran pemerintah Kepulauan Bangka Belitung pada Nesparda yang berhubungan dengan promosi dan pembinaan pariwisata pada tahun 2011 sebesar Rp. 42,7 milyar. Sedangkan di 2017 anggaran tersebut turun menjadi hanya Rp. 21,8 miliar atau turun 48,9%. Adapun alokasi dana promosi ini terlihat ada perubahan komposisi. Jika di 2011 alokasi terbesar pada pengeluaran untuk rencana koordinasi pengembangan pariwisata sebesar 15,62 %, maka di 2017 pengeluaran terbesar ada pada promosi pariwisata yaitu 57,11 %. Sedangkan pengeluaran untuk rencana dan koordinasi hanya tinggal 21,64 %. Walaupun secara nilai rupiah sebenarnya angka di 2017 sangat kecil namun dapat menggambarkan bahwa promosi sudah menjadi bagian yang utama jika dibandingkan di 2011 yang masih merupakan masa-masa awal pengembangan pariwisata yang lebih banyak berfokus pada masalah perencanaan dan koordinasi.

Alokasi anggaran yang ada sayangnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah anggaran dari tahun ke tahun namun dalam realisasinya ternyata tidak pernah mencapai angka 90 % dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 85,7 % namun turun lagi menjadi 81,9 % di 2019.

Dari sisi plafon anggaran maka terlihat bahwa Dinas Pariwisata sebenarnya memiliki alokasi yang tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan perangkat daerah yang lain. Dinas Pariwisata menempati urutan ke-7 dari semua perangkat daerah yang ada Kepulauan Bangka Belitung (di luar Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Bakuda). Dengan alokasi sebesar 1,17 % dari belanja APBD tersebut maka dapat dikatakan bahwa dari sisi kebijakan anggaran bahwa Dinas Pariwisata masih mendapatkan perhatian sebagai salah satu sektor unggulan di kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut sejalan dengan sektor unggulan pada RPJMD, serta pernyataan Kepala Bappeda Kepulauan Bangka Belitung yang mengatakan bahwa ada tiga sektor unggulan yang akan dikembangkan yaitu: sektor Pertanian, Pariwisata dan Kelautan dan Perikanan (wawancara 25 November 2019).

Kesimpulan

Temuan yang menjadi hasil penelitian ini bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik, yang terlihat dari meningkatnya sumbangan sektor pariwisata, manfaat pariwisata, dan peran pariwisata dalam perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup namun belum optimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung. Dari lima aspek yang diteliti terbukti bahwa tiga aspek yaitu kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget sudah cukup baik dalam menunjang pembangunan pariwisata. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung jika dipandang dari konsep WOG.

Rekomendasi

1. Untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disarankan agar melakukan kembali konsolidasi dan pendalaman secara internal terhadap dokumen Ripparprov. Hal ini dilakukan agar dapat lebih memahami peranan dan apa saja yang merupakan tugas Dinas Pariwisata. Kemudian mengetahui apa yang menjadi tugas instansi lainnya, termasuk kapan waktunya tugas-tugas itu dilakukan berdasarkan target dalam lampiran IV Ripparprov.
2. Menyampaikan informasi tentang peran instansi lain tersebut baik secara formal maupun informal, serta memperbaiki koordinasi antar organisasi dan sharing informasi guna dapat memacu pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dalam rangka mengefektifkan peran selaku koordinator dan penanggungjawab pembangunan pariwisata, Dinas Pariwisata agar melakukan penyempurnaan struktur organisasi yang ada.

Daftar Referensi

- Alexander, E. R. 1995. *How Organizations Act Together: Interorganizational Coordination in Theory and Practice*. Amsterdam: Natherland:Gordon and Breach Publishers.
- Gunn, C. A, & Turgut, V. 2002. *Tourism Planning: Basic Concept Cases*. New York: Routledge.
- Ling, 2002. Delivering Joint-Up Government in UK: Dimensions, Issues and Problems, *Public Administration*, 80(4):615 – 644.
- Management Advisory Committee. 2004, *Connecting Government Whole of Government Responses to Australia's Priority Challenges*, Commonwealth Australia.
- Maleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mill, R.C. & Morrison, A.M. 1985. *The Tourism System*. Englewood Clift: Prentice Hall Inc.
- Pitana, I.G & Gayatri, P. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, A. G., 2017. Pendekatan Whole of Government (WOG) Dalam Kebijakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) (Study Implementasi Pergub DIY No 51 Tahun 2013 Tentang Sistim Penyelenggaraan Jamkesus Bagi Penyandang Disabilitas di DIY). Thesis Magister Administarsi Publik UGM. Yogyakarta.
- Neraca Satelit Pariwisata Daerah Kepulauan Bangka Belitung 2011.
- Neraca Satelit Pariwisata Daerah Kepulauan Bangka Belitung 2017.
- Safran, Y. dkk. 2019. Lesson Learned from Belitung Mangrove Park: Converting Inactive Tin Mining Area to Mangrove Tourism Park to Support Ecosystem Rehabilitation and Carbon Sequestration. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 363 01200.
- Valeriani, D. 2017. Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disertasi Program Pasca Sarjana UNSRI, Palembang.
- Yin. 1996. *Study Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
- Peraturan Desa Dalil Kabupaten Bangka Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Wisata Edukasi Rimbe Mambang.

Sumber Internet

- Indonesia.go.id (diakses pada tanggal 3 November 2019).
- <http://kebunrayadaerah.krbogor.lipi.go.id/> (diakses pada tanggal 5 Noembar 2019).